

Tinjauan Semesteran Perekonomian Indonesia

Bobby Hamzar Rafinus
Komara Djaja

Kata Kunci: Kondisi ekonomi-Analisis ekonomi

Key Word: Economic condition-Economic analysis

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia selama paruh pertama 2003 ditandai dengan stabilitas yang mantap. Rupiah terus menguat, suku bunga SBI terus menurun, dan inflasi yang rendah. Hal ini mengindikasikan potensi gejolak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul dari kejadian bom Bali, perang Irak dengan Amerika Serikat, dan wabah SARS telah dapat dikendalikan. Kerentanan perekonomian Indonesia terhadap gejolak dari luar (*external shock*) tampak semakin berkurang. Kemantapan ini telah menjadi faktor penting masuknya arus portofolio asing dalam beberapa bulan terakhir.

Perkembangan ekonomi domestik tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam tinjauan kali ini setelah pembahasan perkembangan ekonomi regional, khususnya berkaitan dengan dampak ekonomi dari perang Irak dengan Amerika Serikat dan wabah SARS. Dalam pembahasan ekonomi domestik akan disampaikan perkembangan terakhir di sektor moneter, neraca pembayaran, perbankan, dan sektor riil. Pada akhir tinjauan ini akan disampaikan ulasan hasil kaji-ulang ke 8 dan ke 9 dari program kerjasama ekonomi dengan IMF dan seputar berakhirnya program tersebut pada akhir tahun 2003, yang telah menjadi topik yang hangat dalam beberapa bulan terakhir ini.

2. PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

Spekulasi serangan Amerika Serikat ke Irak yang menjadi perhatian masyarakat internasional sejak tahun 2002 akhirnya menjadi kenyataan pada triwulan I-2003. Serangan Amerika Serikat yang begitu intensif sejak 20 Maret 2003 ke beberapa kota di wilayah Irak berujung pada berhasil dikuasainya Baghdad, sebagai jantung kekuasaan negara Republik Irak, pada tanggal 9 April 2003. Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, secara resmi telah mendeklarasikan berakhirnya perang tersebut di kapal induk USS Abraham Lincoln pada awal Mei 2003.

Jangka waktu perang yang relatif pendek, kurang dari 3 bulan, telah diramalkan secara umum akan memberi dampak positif bagi perekonomian global dan regional. Lembaga *Center for Strategic and International Studies* yang berada di Washington DC memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan bertambah 0,1 persen dari perkiraan semula. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur diperkirakan mengalami penambahan 0,2 persen. Perkiraan tersebut didasari asumsi bahwa perang yang berakhir cepat akan diikuti dengan kenaikan harga minyak dunia yang relatif tinggi akibat kelangkaan pasokan dengan terhentinya sediaan minyak dari Irak.

Perkembangan harga minyak dunia pasca perang Irak dan masih berlangsungnya ketegangan di dalam wilayah Irak dan kawasan regional sekitarnya dapat menyebabkan dampak positif dari penyelesaian perang yang cepat menjadi tidak signifikan. Perkembangan harga minyak dunia sesuai perang Irak dengan Amerika Serikat menunjukkan tingkat kenaikan yang relatif rendah dari perkiraan semula. Selain itu kemajuan rehabilitasi fisik wilayah Irak berlangsung lambat karena masih berlangsungnya perlawanan sebagian masyarakat Irak secara gerilya terhadap penguasa militer Amerika Serikat

Perekonomian Asia mengalami guncangan yang lebih berat dengan adanya wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Wabah ini pertama kali dilaporkan terjadi di wilayah Guangdong - Cina Selatan pada bulan November 2002. Penderita sakit SARS di luar Cina mulai dilaporkan pada bulan Februari 2003.

Penyebaran penyakit SARS cepat meluas ke berbagai negara. Hingga pertengahan April 2003 jumlah penderita yang mungkin terjangkit (*probable*) SARS mencapai 1.814 orang yang tersebar di 27

negara, termasuk Brazil, Africa Selatan, dan India. Di Amerika Serikat dilaporkan 36 kasus probable SARS yang tersebar di 18 negara bagian pada waktu itu.

Badan kesehatan dunia, WHO, menyatakan bahwa kota-kota yang memiliki bandara udara internasional merupakan tempat beresiko tersebar nya SARS. Untuk itu berbagai negara melakukan upaya mengatasi penyebaran SARS secara intensif dengan melakukan pengawasan secara ketat di bandara terhadap wisatawan yang berasal dari negara-negara yang telah terjangkit SARS, khususnya Cina (Beijing dan Guangdong) dan Hongkong. Beberapa negara bahkan telah mewajibkan perlakuan semacam karantina bagi wisatawan tersebut. Penggunaan masker penutup mulut juga sempat meluas di berbagai Negara, khususnya bagi pekerja di lingkungan pelayanan kesehatan dan bandara udara. Libur massal bagi pekerja dan anak sekolah juga diberlakukan di beberapa tempat, seperti Singapura dan Batam, untuk mencegah perluasan wabah SARS.

Dengan langkah-langkah pencegahan yang ketat terhadap penyebarannya, perkembangan penderita wabah SARS cenderung menurun memasuki Juni 2003. Menurut data WHO, jumlah kasus SARS kumulatif tercatat 5663 orang pada akhir April 2003 melonjak menjadi 8317 orang pada akhir Mei 2003 dan sedikit naik mencapai 8447 orang pada akhir Juni 2003. Sekitar 10 persen dari kasus SARS tersebut meninggal dan sisanya berhasil disembuhkan hingga akhir Juni 2003. Sebagian besar kasus SARS berada di Cina, Hongkong, Taiwan, Kanada, dan Singapura.

Meskipun jumlah penderita SARS sudah banyak berkurang, namun demikian potensi penyebarannya masih relatif besar khususnya di negara-negara berkembang. Dengan fasilitas dan anggaran kesehatan yang terbatas maka pengawasan terhadap kemungkinan penyebaran wabah SARS relatif longgar dibandingkan negara maju. Untuk itu kerjasama antar-negara seperti yang dilakukan ASEAN dengan Cina merupakan salah satu langkah menuju pengawasan penyebaran SARS secara permanen dan terpadu.

Dampak wabah SARS terhadap perekonomian regional berawal dari menurunnya kegiatan pariwisata. Negara dengan peran sektor pariwisata yang penting, seperti Singapura dan Hongkong terganggu perekonomiannya dengan adanya wabah ini. Pada awal April dilaporkan

sejumlah maskapai penerbangan Asia telah menurunkan kegiatan penerbangannya berkisar 20 persen hingga 70 persen. Wisatawan ke Hongkong dan Singapura turun sekitar 70 persen dan 61 persen. Pada giliran selanjutnya kegiatan perdagangan eceran juga cepat merosot.

Menurut perkiraan analisis kelompok Citibank pada bulan April 2003, pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2003 akibat wabah SARS. Penurunan terbesar sekitar 1 persen dari perkiraan semula akan terjadi di Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Cina. Pemerintah pada negara-negara ini memberikan paket bantuan kebijakan kepada kelompok usaha yang terkena dampak wabah SARS, seperti keringanan pajak penghasilan dan pajak properti. Sedangkan bagi perekonomian Indonesia, Philipina, Thailand, dan Vietnam dampak wabah SARS diperkirakan relatif kecil pengaruhnya.

3. PERKEMBANGAN EKONOMI DOMESTIK

Stabilitas politik dan manajemen ekonomi makro yang solid merupakan faktor utama yang meningkatkan stabilitas ekonomi makro dalam semester pertama tahun 2003. Hal ini telah mempengaruhi sentimen pasar seperti tercermin dari perbaikan rating Indonesia oleh pemeringkat *Standard & Poor's* dari CCC+ menjadi B- untuk investasi jangka panjang dalam valuta asing dan dari B- menjadi B untuk investasi jangka panjang dalam Rupiah pada awal Mei 2003. Perbaikan peringkat tersebut masih berada di bawah peringkat yang menarik untuk investasi.

Peringkat Indonesia tersebut, menurut terminologi *Standard and Poor's*, masih dalam kelompok *distinctly speculative grade* yang berarti rentan untuk tidak membayar namun memiliki kapasitas membayar kewajiban. Indikasi peringkat ini tidak sepenuhnya tepat karena banyak obligasi yang baru diterbitkan oleh beberapa perusahaan dan pemerintah Indonesia menarik banyak investor domestik maupun asing. Meskipun demikian upaya memelihara stabilitas ekonomi makro perlu terus dilanjutkan.

3.1. Perkembangan Moneter

Kebijakan moneter yang solid telah menghasilkan penguatan Rupiah dan inflasi yang rendah selama semester pertama 2003. Nilai tukar Rupiah menguat dari Rp 8.800 per USD pada awal tahun menjadi di bawah Rp 8.300 per USD pada akhir triwulan kedua 2003. Inflasi menunjukkan penurunan dari 10 persen pada akhir tahun 2002 menjadi 6,1 persen pada bulan Juni 2003.

Penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir ini terutama disebabkan adanya arus modal masuk yang memanfaatkan relatif tingginya *yield* dalam asset rupiah. Aliran arus modal masuk juga berkaitan dengan diterbitkannya Surat Utang Negara (SUN) dan beberapa obligasi korporat yang telah memperkaya ragam profil resiko kembalian dari pasar obligasi Indonesia. Disamping itu juga divestasi saham pemerintah pada beberapa bank, seperti Bank Danamon dan Bank Niaga.

Terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan juga menjadi faktor yang mendukung penguatan nilai tukar Rupiah. Keberhasilan pemerintah melaksanakan peradilan bagi tersangka kasus bom Bali memberikan citra kesungguhan penyelesaian kasus yang membawa korban banyak warga negara asing, khususnya Australia.

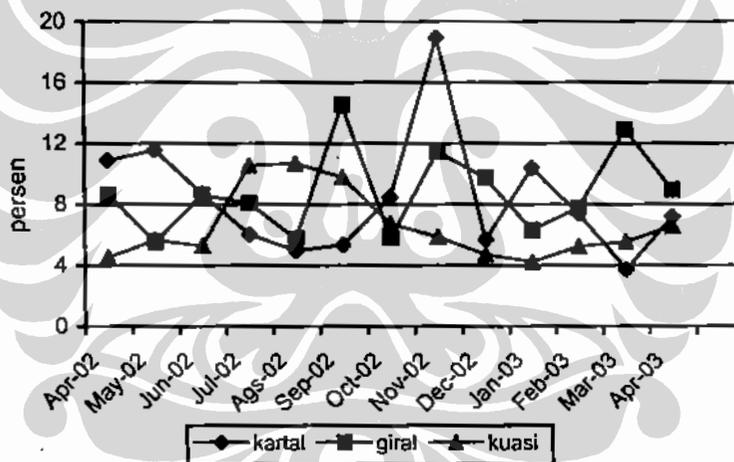
Sementara itu inflasi berhasil dikendalikan sebesar 1,23 persen selama enam bulan pertama 2003. Tingkat ini jauh lebih rendah dari tahun 2002 dan 2001 yang mencapai 5,46 persen dan 4,46 persen. Tingkat inflasi tahunan yang relatif rendah yaitu 6,62 persen tampaknya didorong oleh penurunan harga kelompok bahan makanan yang mempunyai timbangan tertinggi dalam perhitungan inflasi. Sub-kelompok komoditi bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran tercatat mengalami penurunan harga terbesar dibandingkan kelompok komoditi lain selama enam bulan pertama tahun 2003.

Sejalan dengan penurunan tingkat inflasi, suku bunga SBI juga turun secara bertahap. Selama periode Januari – Juni 2003 suku bunga SBI 1 bulan turun sekitar 3,4 persen sehingga mencapai 9,53 persen. Penurunan ini merupakan kebijakan Bank Indonesia yang mengarahkan suku bunga ke level yang lebih rendah dengan menimbang kondisi pasar uang dan perbankan yang eksekutif likuiditas. Kecenderungan ini juga terjadi pada suku bunga perbankan, namun dengan penurunan yang

lebih cepat pada suku bunga deposito dibanding suku bunga kredit. Penurunan suku bunga ini diharapkan akan terus berlanjut karena suku bunga riil Indonesia masih lebih tinggi daripada sejumlah negara di kawasan Asia.

Sementara itu jumlah uang beredar selama triwulan I-2003 menunjukkan pertumbuhan melambat, sebagai fenomena *seasonal* yang biasa terjadi setelah hari-hari besar selama akhir tahun. Rata-rata pertumbuhan M1 selama tiga bulan tersebut sebesar 8,24 persen yang lebih rendah dari 9,85 persen rata-rata pertumbuhan selama triwulan IV-2002. Pertumbuhan melambat terutama terjadi pada komponen kartal. Pertumbuhan uang kartal selama periode Januari – April sebesar -10,3 persen. Hal ini menunjukkan kembalinya uang masyarakat ke perbankan, seperti terlihat dari meningkatnya jumlah uang giral maupun uang kuasi.

Gambar 1
Pertumbuhan Komponen Uang Beredar



Sejalan dengan penurunan jumlah uang kartal, jumlah uang primer juga melambat selama periode Januari - April 2003. Namun tercatat kenaikan dalam jumlah besar selama bulan Mei 2003 menjadi Rp 128,84 triliun dan Rp 132,4 triliun pada bulan Juni 2003. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang kartal di

masyarakat. Hal ini dapat merupakan indikasi meningkatnya kepastian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi.

Di sektor perbankan terlihat adanya peningkatan pertumbuhan kredit dari rata-rata pertumbuhan bulanan 15,2 persen pada triwulan IV-2002 menjadi 21,3 persen pada triwulan I-2003. Pertumbuhan ini berasal pemberian kredit dalam rupiah. Sedangkan kredit dalam valuta asing masih tumbuh negatif.

Pertambahan jumlah kredit masih didominasi oleh kredit modal kerja. Dari posisi total kredit sebesar Rp 376,1 triliun pada bulan Maret 2003, sekitar Rp 206,0 triliun merupakan kredit modal kerja dan Rp 87,1 triliun kredit investasi, serta Rp 83,0 kredit konsumsi. Perkembangan ini tidak terlepas dari lebih cepatnya penurunan suku bunga kredit modal kerja dibandingkan suku bunga kredit investasi. Dalam periode Maret 2002 hingga Maret 2003 suku bunga kredit modal kerja turun sebesar 127 basis poin sedangkan suku bunga kredit investasi hanya sebesar 24 basis poin.

Sementara itu jika diamati sebaran lokasi pemberian kredit baru tampak tidak ada perubahan pola yaitu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jika ditinjau menurut sektor, maka terlihat kenaikan yang menonjol pemberian kredit kepada sektor lain-lain, jasa-jasa dan perdagangan. Hal ini sejalan dengan tingginya pemberian kredit modal kerja ketimbang kredit investasi.

Pemberian kredit usaha kecil, yaitu kredit di bawah Rp 500 juta, mencapai Rp 63,6 triliun hingga Maret 2003. Sebagian besar kredit ini disalurkan pada sektor lain-lain, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Kelompok bank pemerintah berperan lebih besar dalam penyaluran kredit kecil dibandingkan kelompok bank lain. Sebaran geografis kredit kecil masih juga terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun penyaluran kredit di wilayah Sumatera terlihat menunjukkan kenaikan yang berarti sejak tahun 2002.

Penyaluran kredit yang lebih banyak berjangka pendek terkait dengan komposisi sumber dana perbankan. Jumlah dana pihak ketiga perbankan mencapai Rp 838,7 triliun pada Maret 2003, yang terdiri dari deposito sejumlah Rp 455,3 triliun, tabungan sebesar Rp 190,3 triliun, dan giro sebesar Rp 193,2 triliun. Sebagian besar deposito, sekitar Rp 252,2

triliun merupakan deposito 1 bulan. Dengan demikian sekitar 76 persen dana pihak ketiga berjangka pendek. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya dana yang menjadi beban perbankan, terlebih-lebih dengan semakin menurunnya suku bunga SBI yang selama ini menjadi sumber pendapatan potensial. Dengan alasan ini maka bank cenderung menanamkan dana pada investasi berjangka pendek seperti kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan investasi jangka panjang yang likuid di pasar sekunder seperti obligasi korporasi dan reksa dana.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja meningkat selama triwulan I-2003 dengan pertumbuhan 2,04 persen. Sumber pertumbuhan tersebut terutama berasal dari sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman bahan makanan. Periode triwulan I setiap tahun pada umumnya merupakan puncak musim tanaman padi.

Jika faktor musim panen dihilangkan yaitu dengan membandingkan kinerja ekonomi triwulan yang sama tahun 2002, maka pertumbuhan ekonomi triwulan I-2003 didukung relatif secara merata oleh semua sektor. Pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan I-2003 tercatat sebesar 3,43 persen. Beberapa sektor mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Sedangkan sektor yang mencatat pertumbuhan lebih rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa.

Jika pertumbuhan triwulan I-2003 dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2002, maka hanya terjadi peningkatan pada komponen ekspor. Menurut Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia memang terjadi penurunan kegiatan usaha pada triwulan I-2003. Penurunan ini merupakan factor musiman, dengan besaran yang meningkat dibanding tahun-tahun lalu. Dari sembilan sektor yang disurvei hanya tiga sektor yang mengalami peningkatan kegiatan usaha yaitu sektor jasa-jasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor listrik, gas, dan air bersih.

Survei (SKDU) tersebut memperkirakan terjadi peningkatan kegiatan usaha pada triwulan II-2003. Hal ini akan dipacu oleh peningkatan permintaan. Sektor yang akan menjadi pendorong adalah

sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor pertanian. Penggunaan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut diperkirakan akan meningkat.

Tabel 1
Laju Produk Domestik Bruto Triwulanan Menurut Sektor
Triwulan I 2002- Triwulan I 2003, dalam persen

Lapangan Usaha	2002- Tr.I	2002-Tr.II	2002- Tr.III	2002- Tr.IV	2003-Tr.I
Pertanian, kehutanan, perikanan	14,64	5,73	5,90	-20,26	15,56
Pertambangan dan penggalian	2,51	-3,22	1,64	4,87	-1,68
Industri pengolahan	-0,32	0,47	2,82	-0,53	-0,06
Listrik, gas, dan air bersih	-1,85	2,65	3,06	5,03	-4,55
Bangunan	-1,03	1,49	2,60	2,76	-1,16
Perdagangan, hotel, dan restoran	0,67	1,21	2,69	-0,92	0,46
Pengangkutan dan komunikasi	0,33	1,09	1,39	3,30	0,33
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1,85	1,41	1,01	2,33	0,81
Jasa-jasa	0,15	0,55	0,58	0,51	0,30
Produk Domestik Bruto	2,42	1,30	2,75	-2,61	2,04

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan kegiatan usaha pada triwulan II-2003 tampaknya dikonfirmasi oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Total penjualan eceran dalam bulan April 2003 hingga Juni 2003 diperkirakan meningkat dengan rata-rata sekitar 4 persen. Kenaikan penjualan terutama akan terjadi pada kelompok pakaian dan perlengkapannya, kelompok makan dan tembakau, kelompok bahan kimia, serta kelompok kendaraan dan suku cadangnya.

Hal lain yang menarik dari hasil SPE adalah semakin besarnya ekspektasi pengusaha terhadap penurunan suku bunga kredit dalam beberapa bulan mendatang. Ekspektasi tersebut sejalan dengan hasil Survei Kredit Perbankan (SKP) yang mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan permintaan kredit baru serta penurunan sukubunga kredit pada triwulan III-2003. Indikasi tersebut didorong oleh meningkatnya prospek usaha nasabah dan cukup kuatnya permodalan

bank. Peningkatan kredit tersebut diperkirakan berlanjut hingga triwulan III-2003, khususnya untuk kredit modal kerja (KMK).

Momentum kecenderungan penurunan pesimisme terhadap prospek ekonomi dari hasil survei pada tataran mikro tersebut perlu dijaga dengan mendorong penyaluran kredit yang telah disetujui oleh bank. Jumlah kredit yang belum dicairkan debitur tersebut mencapai Rp 87 triliun hingga pertengahan tahun 2003. Penumpukan dana ini merupakan beban bagi perbankan karena menurunkan CAR dan mengharuskan penyediaan cadangan serta pendapatan yang relatif kecil. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk berinvestasi dan memanfaatkan kredit yang dipinjam.

Apabila iklim usaha domestik semakin kondusif dan faktor eksternal membaik, dengan selesainya perang Irak dan menurunnya penyebaran wabah SARS, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang lebih tinggi pada triwulan mendatang. Peran konsumsi masyarakat dan investasi diharapkan lebih meningkat dengan kondisi eksternal yang membaik. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diperkirakan dapat mencapai rentang 3,5 persen hingga 4 persen sebagaimana direncanakan.

3.3. Neraca Pembayaran

Perkembangan ekspor dan impor dalam lima bulan pertama tahun 2003 memberikan indikasi peningkatan. Ekspor meningkat 11,6 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2002. Sementara ekspor nonmigas meningkat 8,18 persen. Peningkatan ekspor banyak dipengaruhi oleh perkembangan kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas pertambangan dan pertanian dunia. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan ekspor non migas ke Amerika Serikat dan beberapa negara Asia, khususnya komoditi mesin/peralatan listrik, alas kaki, dan barang rajutan.

Sementara itu peningkatan impor mencapai 21,01 persen selama lima bulan pertama 2003 dibanding periode yang sama 2002. Kenaikan ini terutama berasal dari impor non migas yang meningkat 19,35 persen. Impor non migas terbesar terjadi pada mesin dan pesawat mekanik, barang konsumsi dan bahan baku/penolong. Impor terutama banyak dari Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Pada neraca modal tercatat kecenderungan peningkatan arus masuk modal sektor swasta dalam triwulan II dibanding triwulan I-2003. Hal ini antara lain tercermin dari melonjaknya kapitalisasi kepemilikan asing di pasar modal dari Rp 59,7 triliun pada akhir Maret 2003 menjadi Rp 73,0 triliun pada akhir Mei 2003. Keikutsertaan investor asing telah meningkatkan indeks harga saham gabungan dari 398 pada akhir Maret 2003 menjadi 505,5 pada akhir Juni 2003.

3.4. Program Ekonomi Dengan IMF

Selama paruh pertama tahun 2003 pemerintah Indonesia telah dua kali mengirimkan *Letter of Intent* (LOI) kepada Dewan Direktur IMF. Pada LOI yang dikirimkan tanggal 28 Maret 2003 disampaikan rencana program ekonomi pemerintah selama tahun 2003. Sedangkan pada LOI berikutnya tanggal 25 Juni 2003 dijelaskan kemajuan program tersebut hingga triwulan pertama 2003.

Dalam LOI yang disampaikan pada bulan Maret 2003, pemerintah menyatakan bahwa memelihara pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan prospek lapangan kerja dengan meningkatkan daya saing dan perbaikan iklim investasi merupakan tujuan program ekonomi tahun 2003. Tujuan tersebut akan dicapai dengan serangkaian langkah, yaitu melanjutkan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, dengan penekanan pada manajemen hutang yang mendukung keberlanjutan anggaran. Kedua, meningkatkan stabilitas sistem keuangan dengan meningkatkan ketahanan sistem perbankan, pengelolaan bank pemerintah, dan serta kerangka pengaturan system keuangan. Ketiga, pelaksanaan reformasi struktural dan hukum untuk meningkatkan iklim investasi.

Penurunan laju inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah akan merupakan arah kebijakan moneter selama tahun 2003. Sejalan dengan arah tersebut dan untuk mendukung pemulihan ekonomi, pertumbuhan uang primer (*base money*) ditargetkan 13 persen hingga 14 persen pada akhir tahun 2003.

Sedangkan dalam kebijakan fiskal akan dilanjutkan konsolidasi untuk mengurangi hutang pemerintah ke tingkat yang lebih terkendali, dengan tetap menjaga alokasi anggaran untuk prasarana dan jasa

pelayanan masyarakat yang penting. Defisit anggaran tahun 2003 ditargetkan sebesar 1,8 persen PDB. Selain itu pemerintah juga akan melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bukan migas, dan mempertajam prioritas program sosial dan pembangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak bukan migas akan dilanjutkan reformasi administrasi pajak yang sudah dimulai tahun 2002, antara lain dengan memperluas cakupan Kantor Pembayar Pajak Besar yang ada di Jakarta dan penerapan sistem pembayaran elektronik secara nasional. Reformasi bea-cukai juga akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2003.

Subsidi bahan bakar minyak akan dihapuskan dalam tahun anggaran 2003, dengan pengecualian minyak tanah untuk rumah tangga. Dengan kebijakan ini diharapkan subsidi lebih dinikmati oleh masyarakat miskin. Penghapusan subsidi dilakukan dengan tetap memperhitungkan gejolak harga minyak di pasar dunia yang terjadi akibat perang Irak dengan Amerika Serikat. Hal ini tercermin dari perubahan harga BBM yang relatif kecil rentangnya dalam paruh pertama tahun 2003.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan BUMN akan dilanjutkan dengan meningkatkan program audit kinerja, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan koreksi pada Garuda, Pelindo II, Jasa Marga, Telkom, dan FTPN-IV. Audit kinerja berikutnya akan dilakukan pada PT Dirgantara, PT Kereta Api, PT Taspen, Semen Gresik, dan PT Pusri. Rencana audit selanjutnya pada BUMN sektor transportasi, pariwisata, dan industri dasar telah diumumkan pada bulan Juni 2003.

Sementara itu reformasi sektor keuangan akan difokuskan pada upaya melanjutkan proses restrukturisasi perbankan agar sistem perbankan dapat menyalurkan kredit dengan efisien dan memulihkan investasi. Hal tersebut mencakup program divestasi perbankan dan peningkatan pengelolaan perbankan. Dalam hal divestasi, Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah berhasil menyelesaikan penjualan saham pemerintah di Bank Danamon. Selain itu juga telah diumumkan rencana penjualan sebagian besar saham pemerintah di Bank Lippo.

Peningkatan pengelolaan bank pemerintah juga menjadi prioritas. Menteri Negara BUMN telah meningkatkan pemantauan terhadap kinerja bank pemerintah dengan menempatkan tambahan pengawas pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Setiap bank pemerintah juga diminta untuk menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil audit tahunan. Pada Bank Mandiri telah dilakukan perubahan susunan direksi untuk perbaikan kinerja dan persiapan pelaksanaan penawaran sahamnya kepada masyarakat pada triwulan kedua tahun 2003.

Rencana jaringan pengaman sektor keuangan, yang merupakan agenda penting lain dalam reformasi sektor keuangan, telah berhasil disusun oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Rencana ini mencakup pembentukan skema penjaminan deposito, peningkatan kemampuan Bank Indonesia melaksanakan fungsi *lender of the last resort*, dan pendirian lembaga pengawas dan pengatur sektor keuangan. Selain itu juga diatur peran berbagai lembaga dalam jaring pengaman, khususnya dalam rangka pengalihan program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*).

BPPN telah mencatat kemajuan penting dalam upayanya memaksimalkan pemulihan aset yang tersisa. Target pendapatan tunai sebesar Rp 7 triliun hingga triwulan kedua tahun 2003 telah berhasil dicapai melalui program penjualan aset. Program penyelesaian kewajiban pemegang saham bank juga hampir selesai. Penyerahan dana tunai dan aset masih terus berlangsung dari debitur yang kooperatif. Jumlah dana yang terkumpul dari program ini diharapkan sebesar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun selama tahun 2003. Sedangkan bagi debitur yang tidak kooperatif sedang diupayakan penyusunan dasar hukum penyelesaiannya.

Sasaran ketiga program ekonomi tahun 2003 adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif. Investasi diperlukan sebagai motor pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja yang hingga kini masih lemah. Selain beberapa kebijaksanaan fiskal, moneter, dan perbankan yang telah diuraikan di atas, investor juga memerlukan kepastian dalam bidang hukum dan peradilan.

Untuk itu akan dilakukan upaya perbaikan administrasi dan prosedur peradilan dalam Pengadilan Niaga. Peningkatan kualitas dan jumlah hakim *ad-hoc* juga akan diupayakan pemerintah bersama dengan

Mahkamah Agung. Kerjasama ini juga akan dilakukan dalam pembentukan Komisi Judisial, yaitu suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Amandemen UUD 1945 untuk meningkatkan pengelolaan dan administrasi peradilan.

Langkah penting lain yang sedang diupayakan adalah pembentukan Komisi Anti Korupsi. Saat ini sedang disusun suatu panitia yang bertugas memilih pimpinan dan anggota komisi tersebut. Pembentukan komisi diharapkan selesai pada akhir tahun 2003. Sehubungan dengan pembentukan komisi ini, maka sedang disusun pula peraturan yang akan mengintegrasikan tugas yang saat ini dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Penyusunan kerangka kerja yang jelas dalam hal hubungan pekerja dengan perusahaan merupakan langkah penting mendorong penciptaan lapangan kerja. Sebagai kelanjutan dari reformasi serikat buruh yang telah dimulai pada tahun 2000, pembaharuan ketentuan hubungan industrial menjadi prioritas dalam tahun 2003. Undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja telah disahkan dan rancangan undang-undang tentang penyelesaian sengketa industrial sedang dibahas bersama DPR.

Dengan pengiriman dua LOI selama enam bulan pertama 2003, IMF telah melakukan kaji-ulang dua kali terhadap kemajuan program ekonomi Indonesia. Dari hasil kaji-ulang tersebut, pada umumnya para anggota Dewan Direktur IMF memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Indonesia menciptakan stabilitas ekonomi. Namun mereka tetap mengharapkan adanya kemajuan dalam reformasi hukum dan peradilan yang penting bagi upaya meningkatkan pertumbuhan investasi dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sebagai kelanjutan dari hasil kaji-ulang tersebut, pemerintah Indonesia mendapatkan pencairan pinjaman dari IMF dua kali dalam semester pertama 2003, masing-masing sebesar 486 juta dollar Amerika Serikat. Pencairan pinjaman IMF, dalam rangka pinjaman *Extended Fund Facility* (EFF) periode 2000-2003, direncanakan masih dua kali lagi hingga akhir tahun 2003. Penarikan pinjaman oleh Indonesia mencapai 2,6 Miliar USD dari jumlah pinjaman EFF 2000-2003 sebesar 3,6 miliar USD pada posisi akhir April 2003.

Masalah pasca berakhirnya pinjaman EFF pada akhir tahun 2003 menjadi perdebatan publik dalam beberapa bulan terakhir ini. Perdebatan ini berawal dari rumusan TAP MPR nomor VI/MPR/2002 yang merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan IMF setelah akhir tahun 2003 dan mempersiapkan rencana untuk mengakhirinya (*exit plan*) agar tidak menimbulkan kegoncangan moneter. Dalam menanggapi rekomendasi ini, Pemerintah telah menyampaikan adanya empat opsi (pilihan) yang dapat dilaksanakan setelah tahun 2003, yaitu 1) memperpanjang program kerjasama yang ada dengan pinjaman baru misalnya *stand-by arrangement* untuk masa satu tahun, 2) menyelesaikan pinjaman EFF dan melaksanakan *post program monitoring* (PPM), 3) menyelesaikan pinjaman EFF dan tanpa melaksanakan PPM, 4) menyelesaikan pinjaman EFF dan melaksanakan *precautionary stand-by arrangement*.

Keempat pilihan ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhadap APBN. Pilihan pertama masih memungkinkan pemerintah mengajukan penjadwalan utang kepada Paris Club, yang dapat mencapai sekitar Rp 21 triliun hingga Rp 25 triliun per tahun. Hal ini akan meringankan beban keuangan pemerintah karena tidak harus mengupayakan pinjaman baru dalam negeri dan luar negeri yang lebih besar. Selain itu cadangan devisa akan semakin besar dengan adanya tambahan pinjaman IMF. Namun pada sisi lain, pilihan ini akan menyebabkan kepercayaan dunia internasional akan kemampuan keuangan Indonesia masih tetap rendah sehingga biaya transaksi yang dikenakan relatif tinggi, misalnya pada premium asuransi.

Ketiga pilihan selanjutnya menimbulkan konsekuensi tidak adanya penjadwalan utang. Untuk membayar beban utang tersebut, Pemerintah harus berinovasi mencari sumber-sumber pembiayaan baru di dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan yang lebih berat akan timbul apabila dilakukan pilihan ketiga. Jumlah cadangan devisa akan menurun tajam ke tingkat sekitar 25 miliar USD dari posisi sekarang sekitar 34 miliar USD. Penurunan ini akan menimbulkan masalah bila tidak diikuti dengan kinerja ekspor dan penanaman modal yang membaik.

Percepatan pengembalian dana pinjaman IMF sebenarnya tidak menguntungkan karena beban bunganya rendah. Sebagai contoh pada triwulan I-2003 beban bunga pinjaman dalam SDR sekitar 2,35 persen.

Bila Bank Indonesia menempatkan dana tersebut pada pasar keuangan internasional, misalnya obligasi jangka panjang di Amerika Serikat (*US treasury bond*) maka diperoleh pendapatan bunga sebesar 3,92 persen. Jadi Bank Indonesia masih mendapatkan margin keuntungan sebesar 1,57 persen. Namun demikian jika kondisi neraca pembayaran Indonesia sudah kokoh pinjaman tersebut tidak lagi diperlukan. Langkah ini dilakukan oleh Korea Selatan dan Thailand dengan mempercepat pengembalian pinjamannya sehingga memperpendek masa PPM.

Pada pilihan keempat, *precautionary stand-by arrangement*, pemerintah tidak meminjam kepada IMF namun mengajukan LOI untuk tujuan menjaga kepercayaan investor bahwa program ekonomi dilaksanakan secara benar dan disiplin. Dengan pilihan ini pemerintah dapat mengajukan secara cepat peralihan pinjaman ke *Extended Fund Facility* jika terjadi kegoncangan moneter. Skim EFF memungkinkan pemerintah mendapat pinjaman dari IMF dan mengajukan penjadwalan utang kepada Paris Club.

PPM adalah kegiatan pemantauan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh IMF terhadap anggotanya yang masih memiliki kewajiban membayar di atas kuota yang telah ditetapkan. Substansi kegiatan pemantauan yang akan dilakukan sama dengan konsultasi tahunan, yaitu kaji-ulang yang dilakukan misi IMF ke masing-masing negara anggotanya setahun sekali (yang sering disebut sebagai *article IV consultation*). Jadi negara yang masih menjalani PPM akan dipantau sekitar dua kali dalam setahun oleh IMF. Jika posisi pinjaman negara tersebut telah berada di bawah 100 persen kuota, maka PPM akan dihentikan. Dalam PPM maupun *article IV consultation* kaji-ulang dilakukan dalam format dialog.

Tabel 2
**Perbandingan Pelaksanaan Post Program Monitoring
 Di Beberapa Negara**

	Korea Selatan	Thailand	Filipina
Periode <i>Standby Arrangement dan Extended Fund Facility</i>	4 Desember 1997 – 3 Desember 2000	20 Agustus 1997 – 19 Juni 2000	20 Februari 1991 – 31 Desember 2000
Jumlah dana yang disetujui (juta SDR)	15,500	2,900	2,146
Jumlah dana yang digunakan (juta SDR)	14,412	2,500	1,909
Akhir <i>Post Program Monitoring (PPM)</i>	Agustus 2001	Agustus 2002	Sedang berlangsung
Lama Periode PPM	8 bulan	26 bulan	- bulan
Kebijakan pemerintah yang dievaluasi oleh <i>Executive Board IMF</i> pada akhir periode PPM	Perkembangan ekonomi makro; Kebijakan fiskal; Kebijakan moneter; Kebijakan restrukturisasi utang swasta; Kebijakan lembaga keuangan.	Perkembangan ekonomi makro; Kebijakan moneter; Kebijakan fiskal; Kebijakan perbankan; Kebijakan restrukturisasi utang; Kebijakan <i>anti money laundering</i>	Perkembangan ekonomi makro; Kebijakan fiskal; Kebijakan perbankan; Kebijakan moneter ; Kebijakan energi; Kebijakan privatisasi; Kebijakan <i>anti money laundering</i> Penyempurnaan statistik.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, (2003). Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Mei.
- , (2003). Statistik Ekonomi Moneter Indonesia, Vol. III. No. 24, Juni.
- , (2003). Bahan Gubernur Bank Indonesia Dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian, 23 Mei.
- , Beberapa bahan Survei Kegiatan Dunia Usaha, Survei Penjualan Eceran, Survei Kredit Perbankan, dan Survei Konsumen diambil dari website Bank Indonesia : <http://www.bi.go.id>
- Bahan Rapat Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah, 15 April. (2003).

Biro Pusat Statistik, (2003). Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Bulan Mei 2003, Berita Resmi Statistik no. 33/VI/1 Juli.

—————, (2003). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2003, Berita Resmi Statistik no.24/VI/19 Mei.

Citigroup, (2003). SARS: Thinking Ahead – Epidemiological and Economic Scenarios, 24 April.

—————, (2003). Improving Economy but Still Poor on Job Creation, Indonesia Market Weekly, 5 June.

Far Eastern Economic Review, (2003). The Cost of SARS in Asia, 24 April.

Laurence Meyer, (2003). After an Attack of Iraq: The Economic Consequences, Conference Summary, CSIS, Washington DC, November 21.

IMF, Beberapa bahan tentang post program monitoring (PPM) diambil dari website IMF, [http:// www.imf.org](http://www.imf.org)

WHO, Beberapa informasi tentang SARS diambil dari website WHO : <http://www.who.org> ■